

ABSTRAK

Tanggung jawab dan peran pasukan penjaga perdamaian dalam misi perdamaian PBB mengalami transformasi dari misi tradisional menjadi multidimensional mencakup kerangka baru yang mengakui pendekatan gender. Untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam misi perdamaian, PBB mengirimkan *female peacekeepers* sesuai dengan Resolusi DK-PBB 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Pada praktiknya, keikutsertaan pasukan perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB masih rendah karena adanya stigma bahwa perempuan belum mampu untuk bertugas dalam suatu misi perdamaian yang didominasi oleh pasukan laki-laki. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian terbanyak di dunia juga bertekad untuk memperluas jumlah pasukan perempuannya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kesetaraan gender dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB khususnya UNIFIL belum dapat diwujudkan dan kontribusi Indonesia sebagai negara kontributor pasukan. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari data sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam misi PBB, khususnya UNIFIL, belum terwujud dan masih jauh dari target sebesar 30% yang ditetapkan UN Women karena berbagai hambatan struktural dan kultural. Meskipun demikian, kehadiran *female peacekeepers* berkontribusi besar dalam efektivitas misi dengan membawa pendekatan keamanan yang lebih inklusif, memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal, dan mempromosikan perdamaian berkelanjutan. Indonesia telah mengirim pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 sesuai kewajiban sebagai anggota PBB dan amanat UUD 1945. Kontribusi Indonesia dalam mengirimkan *female peacekeepers* ke Lebanon yang awalnya sangat rendah di tahun 2008 mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Puncak pengiriman *female peacekeepers* Indonesia dalam UNIFIL terjadi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 86 personel perempuan yang umumnya bertugas pada bantuan kemanusiaan di bidang medis, administrasi, dan logistik, tetapi masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan gender yang merupakan implikasi dari kurangnya kebijakan responsif gender di Indonesia dalam pengiriman Kontingen Garuda.

Kata Kunci: Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan; Kesetaraan Gender; UNIFIL.

ABSTRACT

The roles and responsibilities of UN peacekeeping forces have evolved from traditional operations to multidimensional missions that now include a gender sensitive framework. To ensure that gender perspectives are integrated into peace missions, the United Nations deploys female peacekeepers in accordance with the United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace, and Security. However, the actual participation of women in these missions remains limited due to persistent stigmas suggesting that women are unsuited for male-dominated peacekeeping environments. As one of the world's largest troop-contributing countries, Indonesia is committed to increasing the participation of female personnel in its peacekeeping contingents. This study explores the ongoing challenges in achieving gender equality within UN peacekeeping missions, specifically in UNIFIL, and assesses Indonesia's role in addressing these challenges. This study used a doctrinal method based on secondary data. The collected data were analyzed qualitatively. The study finds that gender equality in UN missions, particularly in UNIFIL, remains elusive and is significantly below the 30% target set by UN Women. This shortfall is largely due to structural and cultural barriers. Despite these challenges, female peacekeepers play a crucial role in enhancing mission effectiveness through inclusive security practices, stronger engagement with local communities, and promote a long-term peacebuilding. Indonesia, which has contributed to UN peacekeeping since 1957 in line with its constitutional and international commitments, has gradually increased the deployment of female personnel to UNIFIL since a low starting point in 2008. The highest recorded deployment occurred in 2024, with 86 women, mainly assigned to roles in medical services, administration, and logistics. Nonetheless, their participation is still constrained by gender inequality and the absence of gender-responsive policies in Indonesia's Garuda Contingent deployment framework.

Keywords: *Female Peacekeepers; Gender Equality; UNIFIL.*